

## Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Kurikulum Merdeka Di SMA Negeri 1 Pamanukan, Kabupaten Subang

**Ayo Suaryo**

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi  
Email : [ayosuwarjo.rb@gmail.com](mailto:ayosuwarjo.rb@gmail.com)

**Riska Oktavia Lurina**

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi  
Email : [oktaviaturina@gmail.com](mailto:oktaviaturina@gmail.com)

**Heri Isnaini**

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi  
Email : [heriisnaini@ikipsiliwangi.ac.id](mailto:heriisnaini@ikipsiliwangi.ac.id)

Korespondensi penulis: [ayosuwarjo.rb@gmail.com](mailto:ayosuwarjo.rb@gmail.com)

**Abstract:** *This research was conducted to answer the problems that arise in learning Indonesian in the independent curriculum in phase E or class X at SMA Negeri 1 Pamanukan. This research focuses on teacher readiness, school support, supporting factors, and obstacles related to the implementation of the independent curriculum. In addition, this study also tries to identify steps that can be taken to overcome obstacles in the implementation of the independent curriculum. The method used in this research is descriptive method, which aims to provide a systematic description of some of the existing relationships. The data used in this study were written data obtained from recorded interviews with Indonesian language teachers who taught in phase E or class X. The data was then transcribed into written form. The interview samples were taken from Indonesian teacher respondents who taught in phase E or class X. Based on the results of data collection, it was found that the learning process in general had been carried out well. However, there are several facts that show there are deficiencies in the implementation of this curriculum. One of the deficiencies found is that not all teachers have received the necessary training, and many of them admit that they have not been able to apply learning in accordance with the achievements of the Independent Curriculum. In addition, cognitive assessment to measure student learning outcomes has also not been implemented thoroughly.*

**Keywords:** *learning problems, Indonesian language, independent curriculum, high school teacher.*

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kurikulum merdeka di fase E atau kelas X di SMA Negeri 1 Pamanukan. Penelitian ini berfokus pada kesiapan guru, dukungan sekolah, faktor pendukung, dan penghambat yang terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Selain itu, penelitian ini juga mencoba mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kendala dalam implementasi kurikulum merdeka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang beberapa hubungan yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tertulis yang diperoleh dari hasil rekaman wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang mengajar di fase E atau kelas X. Data tersebut kemudian ditranskripsi

dalam bentuk tertulis. Sampel wawancara diambil dari responden guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang mengajar di fase E atau kelas X. Berdasarkan hasil pengumpulan data, ditemukan bahwa proses pembelajaran secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Namun, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan adanya kekurangan dalam penerapan kurikulum ini. Salah satu kekurangan yang ditemukan adalah belum semua guru mendapatkan pelatihan yang diperlukan, dan banyak dari mereka mengakui bahwa mereka belum mampu menerapkan pembelajaran sesuai dengan capaian Kurikulum Merdeka. Selain itu, penilaian kognitif untuk mengukur hasil belajar siswa juga belum diterapkan secara menyeluruh.

**Kata kunci:** problematika pembelajaran, bahasa indonesia, kurikulum merdeka, guru SMA

## **PENDAHULUAN**

Bahasa Indonesia berfungsi sebagai media informasi yang diajarkan sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, sebagai alat komunikasi ilmiah, penalaran, dan berpikir kritis siswa. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dibarengi dengan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang secara otomatis mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang maju.

Sementara itu kurikulum merdeka resmi diluncurkan pada 11 Februari 2022 dan kurikulum tersebut baru diterapkan di sekolah tertentu pada tahun pelajaran 2022-2023. Kurikulum Merdeka merupakan rangkaian penyempurnaan kurikulum yang diperkenalkan pada tahun 2006 yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013. Oleh karena itu, perubahan kurikulum pendidikan merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan.

Pembelajaran bahasa Indonesia tahun ajaran 2022/2023 khususnya untuk jenjang SMA/SMK yang menggunakan kurikulum merdeka akan tetap menerapkan pembelajaran berbasis teks dalam bahasa Indonesia. Pembelajaran berbasis teks adalah pembelajaran yang menjadikan teks sebagai landasan, asas, landasan dan landasan (Sufanti, 2013).

Seperti pada kurikulum 2013, pembelajaran bahasa Indonesia masuk dalam kurikulum merdeka pendidikan menengah. Siswa diharapkan dapat menggunakan dan menulis teks yang berbeda sesuai dengan tujuan dan kegiatan sosial mereka.

Namun implementasi kurikulum merdeka tersebut belum dilaksanakan secara maksimal. Sebagian besar guru masih belum mampu melaksanakan pengajaran sesuai dengan kurikulum merdeka karena belum ada pedoman yang lebih spesifik tentang kurikulum merdeka kepada para guru. Oleh karena itu, guru masih menghadapi banyak kendala dalam membuat pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka. Salah satu kendala tersebut, antara lain

kapasitas guru yang tidak memadai, dapat dikaitkan dengan kurangnya kegiatan sosial dan pendidikan guru. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana belajar yang diinginkan dalam kurikulum merdeka masih kurang. Ditambahkan pula bahwa baik guru maupun siswa menganggap mata pelajaran tersebut cukup sulit. Selain itu, sekolah sebagai profesional penyelenggara kurikulum merdeka rata-rata masih belum siap menggunakan kurikulum tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas kajian mengenai problematika pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum merdeka guru SMAN 1 Pamanukan kelas X yang meliputi kesiapan guru, dukungan sekolah, faktor pendukung dan penghambat, serta langkah-langkah untuk mengatasi kendala implementasi kurikulum merdeka?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi problematika pembelajaran bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka pada guru SMA Negeri 1 Pamanukan kelas X yang meliputi kesiapan guru, dukungan sekolah, faktor pendukung dan penghambat, serta langkah-langkah untuk mengatasi kendala implementasi kurikulum merdeka.

Menurut Abd. Muhith (2018:47) Problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah, dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan. Masalah adalah hambatan atau persoalan yang perlu dipecahkan, dengan kata lain masalah adalah kesenjangan antara kenyataan dan sesuatu yang diharapkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Jauhari dkk (2021) menyatakan bahwa masalah didefinisikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan. Krulik dan Rudnik (1995) kemudian menjelaskan bahwa masalah adalah situasi yang dihadapi oleh individu atau kelompok yang membutuhkan solusi, tetapi individu atau kelompok tersebut tidak memiliki cara langsung untuk menentukan solusinya.

Respatiadi (2022) menjelaskan bahwa kurikulum merupakan dasar dari filosofi suatu bangsa. Konsisten dengan hal tersebut, Akib dkk (2020) menunjukkan bahwa pembentukan kehidupan bangsa di masa depan ditentukan oleh kurikulum yang ditetapkan. Kurikulum memegang peranan penting dalam kehidupan suatu bangsa. Kurikulum harus merupakan konsep nyata yang diimplementasikan dengan baik dalam pembelajaran, termasuk mata pelajaran bahasa Indonesia.

Sementara itu, Yekti dan Nur (2022) menyatakan bahwa kurikulum merdeka adalah kurikulum yang sesuai dengan cita-cita tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yang menitikberatkan pada kebebasan belajar mandiri dan kreatif yang berdampak. Dalam pembentukan karakter mandiri siswa yang berkarakter baik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang secara sistematis menyajikan gambaran beberapa hubungan. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif dimana data dikumpulkan dan kemudian dideskripsikan sesuai dengan data yang ditemukan.

Format data dalam penelitian ini adalah data tertulis dari hasil rekaman wawancara yang kemudian disalin ke dalam bentuk tertulis. Subyek penelitian ini adalah permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum Merdeka bagi guru SMA Negeri 1 Pamanukan yang mengajar di fase E atau kelas X. Penelitian ini dilakukan hanya untuk guru yang mengajar di fase E atau kelas X dengan menggunakan kurikulum Merdeka.

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menegaskan beberapa temuan dari proses pembelajaran, yaitu bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di SMAN 1 Pamanukan dengan menggunakan opsi Kurikulum merdeka belajar telah dilakukan dengan baik. Namun, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam penerapan kurikulum ini. Salah satunya adalah belum semua guru mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan, dan banyak di antara mereka mengakui bahwa mereka belum menerapkan pembelajaran sesuai dengan capaian Kurikulum Merdeka. Selain itu, penilaian kognitif untuk mengukur hasil belajar siswa juga belum diterapkan secara menyeluruh.

Namun, ada perkembangan positif terkait dengan ketersediaan buku pelajaran. Persentase kecukupan buku pelajaran untuk murid mencapai 100%, demikian pula dengan buku-buku yang disediakan untuk guru. Hal ini dapat terjadi karena pemerintah telah menyediakan buku dalam bentuk hard copy dan soft copy yang dapat diunduh melalui laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemdikbud). Upaya penyediaan buku elektronik oleh pemerintah telah memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah dalam memenuhi kebutuhan buku pelajaran bagi siswa dan guru.

Seringkali, kurikulum yang tercantum dalam berbagai dokumen kebijakan sulit dipahami oleh para guru. Hal ini menyebabkan adanya distorsi antara harapan pemerintah dan kenyataan di tingkat kelas. Dalam arti, apa yang telah tertulis dalam dokumen kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah belum tentu dapat dilaksanakan oleh para guru. Perbedaan persepsi dan pemahaman tentang isi dan proses kurikulum antar guru juga menjadi faktor yang memengaruhi.

Untuk mengatasi hal ini, data dan perhitungan kuantitatif digabungkan dengan wawancara kepada beberapa guru, kepala sekolah, dan pengawas yang dipilih secara acak. Fokus wawancara tersebut adalah untuk menjawab 5 hal, yaitu kesiapan guru, dukungan sekolah, dukungan Pemerintah Daerah (Pemda), faktor-faktor yang mendukung dan menghambat serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka.

Melalui wawancara ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai persiapan guru, dukungan sekolah dan Pemerintah Daerah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kurikulum Merdeka. Selain itu, wawancara juga bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil guna mengatasi kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut.

Kelima pertanyaan tersebut bertujuan untuk memahami mengapa implementasi Kurikulum Merdeka belum optimal, terutama dari segi manajerial yang melibatkan guru dan berbagai komponen terkait, baik di lingkungan internal sekolah maupun eksternal hingga ke para pemangku kepentingan dan pemerintah. Berikut adalah uraian lebih lengkap mengenai hal tersebut.

Pertama mengenai kesiapan guru dalam implementasi kurikulum merdeka. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, sebagian besar guru menyatakan bahwa mereka belum siap dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Alasan utama yang dikemukakan adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap hakikat dari kurikulum baru tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya desain yang baik dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten dan Kota, Provinsi, bahkan tingkat nasional. Beberapa informasi mengindikasikan bahwa pelatihan seringkali dilakukan secara terburu-buru, misalnya dengan jadwal yang padat atau pelatihan yang berlangsung hingga larut malam.

Dalam praktik implementasi Kurikulum Merdeka, ditemukan bahwa sebagian besar guru tidak membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Sebagai gantinya, mereka mengandalkan materi yang ada dalam buku siswa untuk persiapan pembelajaran. Dalam konteks ini, perbaikan yang diperlukan adalah pada mentalitas para guru, bukan perubahan pada kurikulum itu sendiri. Temuan ini sejalan dengan kesimpulan penelitian yang menyatakan bahwa solusi yang telah diadopsi termasuk mengikuti pelatihan, belajar mandiri, dan mencari informasi melalui internet atau sumber-sumber lain yang memahami Kurikulum Merdeka.

Berdasarkan wawancara dengan para guru, mereka sangat mengharapkan adanya pendampingan dalam implementasi kurikulum merdeka. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, atau instruktur kabupaten. Menurut mereka, kunci keberhasilan implementasi inovasi pembelajaran tidak hanya terletak pada pelatihan, tetapi juga pada pendampingan yang dilakukan setelahnya. Oleh karena itu, para kepala sekolah dan pengawas sekolah juga perlu dilatih mengenai kurikulum merdeka agar mereka dapat memberikan pendampingan yang efektif kepada para guru.

Perubahan dan pengembangan kurikulum di Indonesia dengan menerapkan Kurikulum Merdeka sebenarnya menuju arah yang benar. Fokus utama dalam Kurikulum Merdeka adalah memberikan otonomi kepada siswa dan guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan siswa.

Kedua yaitu dukungan sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka. Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, dukungan dari sekolah merupakan faktor penting. Peneliti mendapatkan banyak informasi dari para narasumber yang mengungkapkan bahwa dukungan dari seluruh anggota warga sekolah untuk implementasi kurikulum ini dirasa kurang, meskipun mereka secara umum menyambut baik adanya kurikulum merdeka. Rendahnya dukungan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam memberikan dukungan demi keberhasilan implementasi kurikulum ini. Oleh karena itu, menurut mereka, perlu adanya tinjauan ulang terhadap pelatihan yang diberikan kepada kepala sekolah, pengawas sekolah, komite sekolah, dan tenaga administrasi mengenai Kurikulum Merdeka.

Menurut peneliti, dalam implementasi kurikulum ini, diperlukan adanya inovasi dalam program pembelajaran. Inovasi seperti ini dapat muncul jika di sekolah terdapat kepemimpinan yang visioner dari kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu menciptakan iklim kerja yang baik yang memungkinkan para guru bekerja dengan nyaman, terutama dalam pengembangan berbagai perangkat persiapan mengajar untuk kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka adalah kurikulum baru, maka wajar jika guru membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya untuk membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau saat ini istilahnya diganti dengan modul ajar dan media pembelajaran yang sesuai. Selain itu, para guru juga diharapkan menerapkan model-model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya, kita dapat menggunakan model pembelajaran yang berbeda yang memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk memahami

konsep dan memperkuat kompetensi. Salah satunya adalah metode pembelajaran berbasis masalah. Metode pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan di mana siswa menggunakan keterampilan berpikirnya untuk memecahkan masalah, mengembangkan pemikiran kritis, memahami peran orang dewasa dalam kehidupan nyata dan mendorong kemandirian dan tanggung jawab siswa. Semua ini didasarkan pada kemampuan matematis siswa berdasarkan tingkat pengetahuan mereka sendiri. Selain itu, metode pembelajaran berbasis proyek dapat diterapkan karena siswa mengetahui bagaimana menggunakan keterampilan berpikirnya untuk meningkatkan kemampuannya memecahkan masalah proyek, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru selama belajar, dan berkolaborasi dengan siswa lain.

Ketiga adalah faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum merdeka. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di lapangan. Pertama, adanya penganggaran yang jelas dari pemerintah daerah untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Hal ini mencakup alokasi dana yang memadai untuk pelatihan, pengadaan sarana pembelajaran, dan kebutuhan lainnya yang terkait dengan kurikulum ini. Kedua, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah (baik kabupaten maupun provinsi) dengan pemerintah pusat dalam hal pengadaan sarana pembelajaran, pelatihan, dan perencanaan yang baik. Dengan koordinasi yang efektif, implementasi kurikulum merdeka dapat berjalan dengan lebih lancar dan terarah. Ketiga, ketersediaan sarana pembelajaran lainnya, seperti LCD dan akses internet, juga sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

Meskipun implementasi Kurikulum Merdeka telah berjalan dengan efektif dalam beberapa bulan terakhir, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Salah satu kendala adalah kurangnya pengalaman dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang mengedepankan kemerdekaan belajar. Guru-guru perlu mendapatkan pendampingan dan pelatihan yang memadai agar mereka dapat mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan baik. Selain itu, keterbatasan referensi yang tersedia juga menjadi kendala, sehingga perlu adanya upaya untuk memperluas akses terhadap referensi yang relevan dan berkualitas. Selain itu, akses yang dimiliki oleh sekolah-sekolah dalam hal pembelajaran juga belum merata, sehingga perlu diperhatikan untuk menyeimbangkan akses pembelajaran antarwilayah. Terakhir, manajemen waktu juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan Kurikulum Merdeka dapat berjalan efektif dan efisien.

Meskipun buku-buku pelajaran sudah tersedia, tetap perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap konten buku-buku tersebut, terutama dalam hal dimensi global. Evaluasi

tersebut perlu dilakukan untuk memastikan bahwa buku-buku pelajaran yang digunakan sudah mencakup dimensi global dan mengikuti perkembangan terkini dalam pendidikan. Hal ini penting agar siswa-siswi dapat mengembangkan pemahaman yang luas dan mendapatkan wawasan yang lebih global melalui pembelajaran.

Keempat adalah langkah-langkah untuk mengatasi kendala implementasi Kurikulum Merdeka. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, terdapat beberapa langkah yang mendesak untuk meningkatkan manajemen implementasi Kurikulum Merdeka. Pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama dalam menetapkan target jumlah sekolah yang akan mengimplementasikan kurikulum ini dalam periode 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun ke depan. Hal ini penting untuk mengarahkan upaya implementasi dengan jelas dan memberikan arah yang jelas bagi semua pihak terkait.

Selanjutnya, diperlukan siklus implementasi yang terstruktur mulai dari penganggaran, pengadaan sarana pendidikan, pelatihan, implementasi dan pendampingan, hingga evaluasi keberhasilan dan kegagalan. Dengan memiliki siklus yang jelas, proses implementasi kurikulum dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi.

Pelatihan juga perlu ditingkatkan dengan pendekatan berjenjang dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pelatihan tersebut harus didesain dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yang baik, dan disampaikan oleh instruktur yang memiliki pengalaman dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para guru serta stakeholder terkait lainnya.

Sementara itu pada pembelajaran bahasa Indonesia menurut responden, umumnya tidak banyak mengalami perubahan karena pada kurikulum merdeka ini masih berbasis teks. Namun ada beberapa pengembangan pada genre teks yang sebelumnya sudah ada. Selain itu di fase E atau kelas X pembelajaran teks eksposisi ditiadakan.

Pada kurikulum merdeka guru juga harus terlibat dalam project penguatan profil pelajar pancasila. Project tersebut adalah sistem pembelajaran yang bertujuan untuk mengamati dan menyelesaikan permasalahan di sekitar melalui lima aspek utama, yaitu : potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran sosial.



## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal terkait implementasi Kurikulum Merdeka di SMAN 1 Pamanukan, Kabupaten Subang. Temuan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang mungkin juga terjadi di daerah lain. Oleh karena itu, hasil dan pembahasan dalam artikel ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan untuk segera mengatasi masalah implementasi Kurikulum Merdeka yang terjadi di lapangan.

Secara umum, penelitian ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka belum berjalan secara efektif. Beberapa faktor penyebabnya adalah sebagai berikut. Pertama, belum semua guru mendapatkan pelatihan, sehingga banyak di antara mereka yang belum mampu menerapkan pembelajaran tematik dan saintifik, serta melakukan penilaian autentik. Kedua, pemahaman guru terhadap substansi kurikulum masih kurang, sehingga mereka kesulitan dalam mengimplementasikannya. Salah satu kelemahan utama guru dalam pembelajaran adalah kurangnya pemahaman tentang pendekatan tematik saintifik tanpa tes kognitif dan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Ketiga, dukungan dari sekolah masih rendah karena masih sedikit warga sekolah yang mendapatkan pelatihan terkait kurikulum ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman warga sekolah, terutama kepala sekolah dan pengawas sekolah, tentang kurikulum baru ini. Keempat, meskipun Pemerintah Daerah telah memberikan dukungan dalam bentuk anggaran pelatihan, pendampingan, dan pengadaan buku, serta mengirimkan guru-kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hasilnya masih belum optimal. Kelima, kurangnya kematangan dalam perencanaan implementasi Kurikulum Merdeka menjadi faktor penghambat. Selain itu, koordinasi yang lemah antara berbagai jenjang pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap implementasi kurikulum juga menjadi kelemahan lainnya. Keenam, manajemen implementasi kurikulum perlu diperbaiki, mulai dari penentuan target implementasi, penganggaran, pengadaan sarana pendidikan, pelatihan, implementasi dan pendampingan, hingga evaluasi keberhasilan dan kegagalannya. Dalam era desentralisasi, implementasi kurikulum juga seharusnya dilakukan secara desentralistik. Koordinasi yang baik antar berbagai jenjang pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota, menjadi kunci penting dalam hal ini.

Beberapa saran untuk perbaikan implementasi Kurikulum Merdeka dengan memperhatikan kelemahan di atas adalah sebagai berikut. Pertama, diperlukan perencanaan yang matang, termasuk penentuan target, penganggaran, pengadaan sarana, pelatihan,

implementasi dan pendampingan, serta evaluasi. Kedua, perlu meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberikan pelatihan kepada guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Hal ini juga mencakup koordinasi dalam pengadaan buku dan pengirimannya ke sekolah-sekolah agar tidak terjadi keterlambatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akib, E., Imran, M. E., Mahtari, S., Mahmud, M. R., Prawiyogy, A. G., Supriatna, I., & Ikhsan, M. H. (2020). Study on implementation of integrated curriculum in Indonesia. *IJORER: International Journal of Recent Educational Research*, 1(1), 39-57.
- Ardianti, Y., & Amalia, N. (2022). Kurikulum Merdeka: Pemaknaan Merdeka dalam Perencanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 6(3).
- Jauhari, M. I., Hartanto, S., & Mudzakkir, M. (2021). Problematika Pembelajaran Daring di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan. *Journal of Education and Religious Studies*, 1(01), 9-15.
- Krulik, Stephen & Rudnick, Jesse A. (1995). *The New Sourcebook for Teaching Reasoning and Problem Solving in Elementary School*. Needham Heights: Allyn & Bacon.
- Muhith, A. (2018). Problematika pembelajaran tematik terpadu di MIN III bondowoso. *Indonesian Journal of Islamic Teaching*, 1(1), 45-61.
- Respatiadi, F., Zid, M., & Hotimah, O. (2022). KOMPARASI KURIKULUM 1964 DAN 1968 SERTA KAJIAN MATERI GEOGRAFI PADA JENJANG SMP. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 9(1), 278-290.
- Sufanti, Main. 2013. *Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teks: Belajar dari Ohio Amerika Serikat*. FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suryawin, P. C., Wijaya, M., & Isnaini, H. (2022). Tindak Tutur (Speech Act) dan Implikatur dalam Penggunaan Bahasa. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan, Volume 1, Nomor 3*, 29-36.